

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH (SIPKD) DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAERAH DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN**

Muhammad Ikhwan

NPP. 29.1187

Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Email: ikhwnmhmd22@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The Regional Financial Management Information System (SIPKD) is an integrated application created by the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs. SIPKD provides benefits in regional financial management. However, in the operation of SIPKD, there are still many problems faced. This has resulted in the benefits of SIPKD not being fully realized. Objectives: This study aims to determine how the implementation of SIPKD in regional financial management in the City of Banjarmasin, the inhibiting factors in the use of SIPKD, and the efforts made by the Regional Government of the City of Banjarmasin Methods: The author uses a qualitative research method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The author analyzed the data using reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. Results/Findings: the results of the research that the author conducted using SIPKD in regional financial management were not optimal. This is caused by employees who are still not proficient in using SIPKD, supporting facilities are not optimal, the network in operating SIPKD sometimes has errors, and information has not been updated on the website. The Banjarmasin City Government made an effort to optimize SIPKD, namely continuing to provide training for employees regarding the operation of SIPKD and Adding employees at Bakeuda Banjarmasin City, as well as repairing and updating facilities and infrastructure. Suggestions from the author for the Banjarmasin City government are to often provide periodic training on SIPKD, install an antivirus to maintain data security, and immediately use the Local Government Information System (SIPD) in Regional Financial Management in accordance with the recommendations of the Ministry of Home Affairs.*

Keywords: *Implementation, Benefits of SIPKD, Effectiveness of SIPKD, Regional Financial Management*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang diciptakan oleh Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. SIPKD memberikan manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam pengoperasian SIPKD, masih banyak masalah yang dihadapi. Hal ini mengakibatkan manfaat SIPKD belum terwujud sepenuhnya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Banjarmasin, faktor penghambat dalam penggunaan SIPKD, serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin **Metode:** Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi,

wawancara dan dokumentasi. Penulis menganalisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian data dan penarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** hasil penelitian yang penulis lakukan penggunaan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh pegawai yang masih belum mahir dalam penggunaan SIPKD, fasilitas pendukung belum maksimal, jaringan dalam pengoperasian SIPKD terkadang eror, dan informasi belum terupdate di website. Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan suatu upaya untuk mengoptimalkan SIPKD yaitu terus melakukan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian SIPKD dan Menambah pegawai di Bakeuda Kota Banjarmasin, serta memperbaiki dan memperbaharui sarana dan prasana. Saran dari penulis untuk pemerintah Kota Banjarmasin yaitu sering memberikan pelatihan berkala mengenai SIPKD, memasang antivirus untuk menjaga keamanan data, Dan segera menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan anjuran dari Kementrian Dalam Negeri.

Kata Kunci: SIPKD, Manfaat SIPKD, Efektivitas SIPKD, Pengelolaan Keuangan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kota Banjarmasin termasuk kota yang melaksanakan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang bertujuan untuk Peningkatan Opini BPK dalam penyajian pengelolaan keuangan di seluruh dinas yang terkait. Pemerintahan Kota Banjarmasin dalam pengelolaan keuangannya sudah sesuai unsur-unsur dan kriteria yang membentuk kualitas informasi pada laporan keuangan pemerintah dengan manfaat ataupun nilai yang dicantumkan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan (PP Nomor 71 Tahun 2010), yakni bisa dilaksanakan perbandingan terhadapnya, andal, relevan, bisa dilakukan pemahaman. Adapun BPK perwakilan Kalimantan Selatan untuk kelima kalinya memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Banjarmasin. Pada umumnya, diterapkannya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Keuangan sudah terselenggara dengan baik pada Pemerintah Kota Banjarmasin, hal ini ditandai dengan sudah dapat ditingkatkan dan dipertahankannya opini WTP yang merupakan output atau hasil akhir dalam Sistem tersebut. Berdasarkan LAKIP yang terdapat pada website Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin implementasi SIPKD terkait pelaksanaan didalamnya tidak selalu berlangsung sejalan harapan sebab ada sejumlah kendala pada proses didalamnya. Diantaranya yakni kendala di sumber daya khususnya finansial dan SDM saat sistem ini dijalankan, oleh karenanya pada proses yang ada banyak salah yang ditemukan saat entry ataupun input data, bahkan dijumpai kode rekening yang pengisiannya salah, tidak sempurna dan tidak lengkap yang nantinya menjadi hambatan atas penyediaan data yang akurat mengenai anggaran yang dikelolanya oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin demi pelaporan pertanggungjawaban. Disamping itu merujuk Informasi yang didapat dari pegawai Badan Keuangan Daerah, pegawai setempat jarang ikut serta pada diklat ataupun pelatihan yang berhubungan dengan SIPKD, yang akhirnya berdampak pada pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa kekurangan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan SIPKD belum terlaksana sepenuhnya sesuai harapan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah sehingga membuat apa yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah belum dapat terpenuhi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat sejumlah faktor selaku kendala saat menerapkan SIPKD pada Pemerintah Kota Banjarmasin ditengah pandemic Covid-19. Pemerintah daerah melalui Bakeuda selaku OPD Kota Banjarmasin harus memberikan perhatian lebih dalam pengelolaan SIPKD ini apalagi ditengah pandemic Covid-19 karena mengingat pentingnya peranan Sistem Informasi Manajemen dalam pengelolaan keuangan yaitu memudahkan penginputan data, tepat dalam perhitungan, kecepatan proses transaksi keuangan, efisien dalam waktu dan biaya, jaminan transparansi sehingga anggaran bisa dikendalikan, serta kemudahan interaksi antar pegawai yang berkepentingan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluaran (output) yang dihasilkan dari sistem ini baik dalam bentuk

laporan keuangan maupun dokumen-dokumen penting lainnya. Dari beberapa kekurangan yang didapatkan dalam sistem tersebut bahwa diterapkannya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut masih belum tercapai sepenuhnya sesuai dengan harapan serta tujuan dari Peraturan Pemerintah sehingga harapan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah belum terpenuhi secara maksimal.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan pelaksanaan didalamnya tidak selalu berlangsung sejalan harapan sebab ada sejumlah kendala pada proses didalamnya. Diantaranya yakni kendala seperti kurangnya kualitas dan kuantitas SDM saat sistem ini dijalankan, oleh karenanya pada proses yang ada banyak salah yang ditemukan saat entry ataupun input data, bahkan dijumpai kode rekening yang pengisiannya salah, tidak sempurna dan tidak lengkap yang nantinya menjadi hambatan atas penyediaan data yang akurat mengenai anggaran yang dikelolanya oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin demi pelaporan pertanggungjawaban. Disamping itu merujuk Informasi yang didapat dari pegawai Badan Keuangan Daerah, pegawai setempat pada masa pandemi covid-19 jarang ikut serta pada diklat ataupun pelatihan yang berhubungan dengan regulasi terbaru mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akhirnya berdampak pada akuntabilitas keuangan daerah di Kota Banjarmasin.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian dari Olivier David Apouw (2020), berjudul "*Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Covid 19*". Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini Implementasi SIMDA Keuangan di lingkungan pemerintah daerah Kota Tomohon merupakan sebuah terobosan guna membuat dan memberikan pelaporan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Penelitian I Kadek Indra Utama (2020), yang berjudul "*Pengaruh Penerapan SAP dan penerapan SIPKD terhadap Kualitas Laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar*" yang dimana metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket dan berusaha menjawab dan menguji kebenaran hipotesis. Adapun hasil dari penelitian ini yakni Penerapan SAP memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Denpasar. Sedangkan Penerapan SIPKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, ini dikarenakan teknologi belum dimanfaatkan secara optimal, kurangnya OPD yang memiliki tenaga operator SIPKD yang mampu dan handal dalam mengaplikasikan sistem itu sendiri. Selanjutnya penelitian Didi Achjari (2020) yang berjudul "*Peran Akuntabilitas Keuangan Sebagai Pemeditasi Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah*" dengan metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada 40 OPD. Dan untuk hasil penelitian dalam penulisan ini yakni menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan mampu memeditasi secara penuh pengaruh implementasi SIPKD terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa tidak terdapat efek moderasi pada pengaruh implementasi SIPKD terhadap akuntabilitas keuangan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaan terletak pada fokus dan lokasi penelitian, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, menggunakan model implementasi Edward III untuk menganalisis keberhasilan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin dalam meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah oleh beberapa faktor penting yaitu, komunikasi, sumber daya atau sumber-sumber, Disposisi (sikap implementator), dan struktur birokrasi pelaksana. Berbeda dengan penelitian Olivier David Apouw, Kadek Indra Utama, Didi Achjari penelitian ini menganalisis secara langsung Implementasi SIPKD yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin pada Badan Keuangan Daerah.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin dalam meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Metode ini digunakan penulis agar mempermudah dalam mengumpulkan data-data, fakta yang nyata dengan mempelajari masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat dan menganalisis dengan tepat sehingga memberikan pemahaman dan pengertian yang mendalam pada objek penelitian untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada setelah dilakukan penelitian dan penarikan kesimpulan berdasarkan kondisi tempat dan waktu, yang dalam hal ini menyangkut tema yang diangkat oleh penulis yakni Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari, Sekretaris Badan Keuangan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Subbid Pelaporan Keuangan, Operator SIPKD Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi Edward III untuk menganalisis keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan yang ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu, komunikasi, sumber daya atau sumber-sumber, Disposisi (sikap implementator), dan struktur birokrasi pelaksana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah menggunakan pendapat dari Edward III, keberhasilan implementasi ditentukan oleh beberapa faktor penting yaitu, komunikasi, sumber daya atau sumber-sumber, Disposisi (sikap implementator), dan struktur birokrasi pelaksana. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Keuangan di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin

Dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah Pemerintahan Dalam Negeri telah membuat suatu aplikasi untuk mempermudah pemerintah daerah mengelola keuangan daerah. Inovasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Aplikasi tersebut dinamakan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah (SIPKD) yang diharapkan dapat mempermudah pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Keuangan telah disediakan untuk seluruh bagian keuangan ditingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan bahkan sampai pada tingkat kelurahan. Beberapa hasil dari pelaksanaan aplikasi ini diantaranya adalah mempercepat proses data dan membentuk jalannya transparansi dan akuntabilitas keuangan di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat kesulitan mengetahui bagaimana penggunaan anggaran oleh pemerintah dalam membangun daerahnya. Melalui aplikasi ini membuat seluruh sistem terintegrasi dengan yang lainnya dan aplikasi ini menyediakan fasilitas bagian eksekutif dan masyarakat umum yang memerlukan informasi keuangan yang berkenaan dengan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang terdiri dari :

1. Komunikasi

Sebuah komunikasi antara pimpinan dan bawahan serta antar sesama pegawai dalam sebuah OPD sangatlah penting, karena komunikasi mempengaruhi pelaksanaan sebuah kebijakan yang telah ditetapkan bersama, jika komunikasi tidak berjalan lancar maka akan mempengaruhi proses pengelolaan informasi keuangan dengan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Dalam komunikasi meliputi, Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi.

2. Sumber Daya

Sumber Daya termasuk faktor yang sifatnya krusial dalam melakukan suatu kebijakan. Oleh sebab itu, pentingnya untuk melakukan pengelolaan secara baik atas sumber-sumber ini agar dapat menunjang peningkatan efisiensi serta efektivitas pada organisasi pemerintahan sehingga menciptakan pegawai yang berkompeten dalam menjalankan pekerjaan. Sumber Daya meliputi, Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas.

3. Disposisi / kecenderungan

Mengacu pemaparan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa disposisi yaitu faktor penting dan mempunyai konsekuensi bagi pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan baik. Apabila para pelaksana memiliki sikap atau kecenderungan positif dan mendukung implementasi kebijakan tersebut maka kebijakan tersebut akan berjalan seperti yang diharapkan walaupun di Badan Keuangan Daerah masih dilakukan penyesuaian disebabkan karena baru dilakukannya mutasi pegawai pada seluruh OPD di Kota Banjarmasin. Namun selama ini yang saya lihat kecenderungan yang ada tidak membuat pegawai bersifat negatif, dengan demikian kebijakan tersebut tidak menimbulkan kendala dan berjalan sesuai tujuan. Disposisi meliputi, Pengangkatan birokrat dan Insentif.

4. Struktur birokrasi

Kebijakan seorang kepala daerah mempunyai pengaruh besar dalam sebuah organisasi terutama dalam penempatan kedudukan atau jabatan kepada pegawai yang berada di seluruh OPD yang berada di Pemerintah Kota Banjarmasin terutama di Badan Keuangan Daerah yang dimana kebijakan dalam memberikan sebuah jabatan kepada seseorang masih melihat dari segi

kekeluargaan atau kolega dan juga tim sukses saat pemilihan kepala daerah yang berlawanan dengan pengetahuan atau pengalaman kerja yang dimiliki, sehingga hal inilah yang dapat memberikan pengaruh yang kurang baik atau kurang efektifnya terhadap pengelolaan keuangan yang ada di Badan Keuangan Daerah. Meliputi, SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Fragmentasi.

3.2 Faktor Penghambat

Proses pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sudah berjalan dengan Optimal. Akan tetapi, dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bakeuda tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, melainkan masih terdapat berbagai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan SIPKD. Adapun hambatan-hambatan yang terdapat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur
- b. Keterlambatan dalam Mensosialisasikan Aplikasi dan Regulasi SIPKD yang Terbaru
- c. Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

3.3 Upaya yang Yang Dilakukan

Upaya dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Banjarmasin dalam Menghadapi Kendala Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), diantaranya :

- a. Terus Melakukan Pelatihan bagi Pegawai mengenai Pengoperasian SIPKD
- b. Memperbaiki Fasilitas Pendukung SIPKD
- c. Mensosialisasikan Aplikasi SIPKD dan Regulasi yang terbaru dengan tepat waktu

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sudah berjalan baik akan tetapi masih ditemui permasalahan dalam proses pelaksanaan SIPKD kendala seperti kurangnya kualitas dan kuantitas SDM saat sistem ini dijalankan, oleh karenanya pada proses yang ada banyak salah yang ditemukan saat entry ataupun input data, bahkan dijumpai kode rekening yang pengisiannya salah, tidak sempurna dan tidak lengkap yang nantinya menjadi hambatan atas penyediaan data yang akurat mengenai anggaran yang dikelolanya oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin demi pelaporan pertanggungjawaban, berdasarkan analisis dengan teori keberhasilan implementasi kebijakan oleh Edward III dimana keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu, komunikasi, sumber daya atau sumber-sumber, Disposisi (sikap implementator), dan struktur birokrasi pelaksana, secara garis besar SIPKD dapat berjalan dengan baik, pemerintah Kota Banjarmasin mampu belajar dari permasalahan apa yang dihadapi dan mencari upaya mengatasi permasalahan dari pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

IV. KESIMPULAN

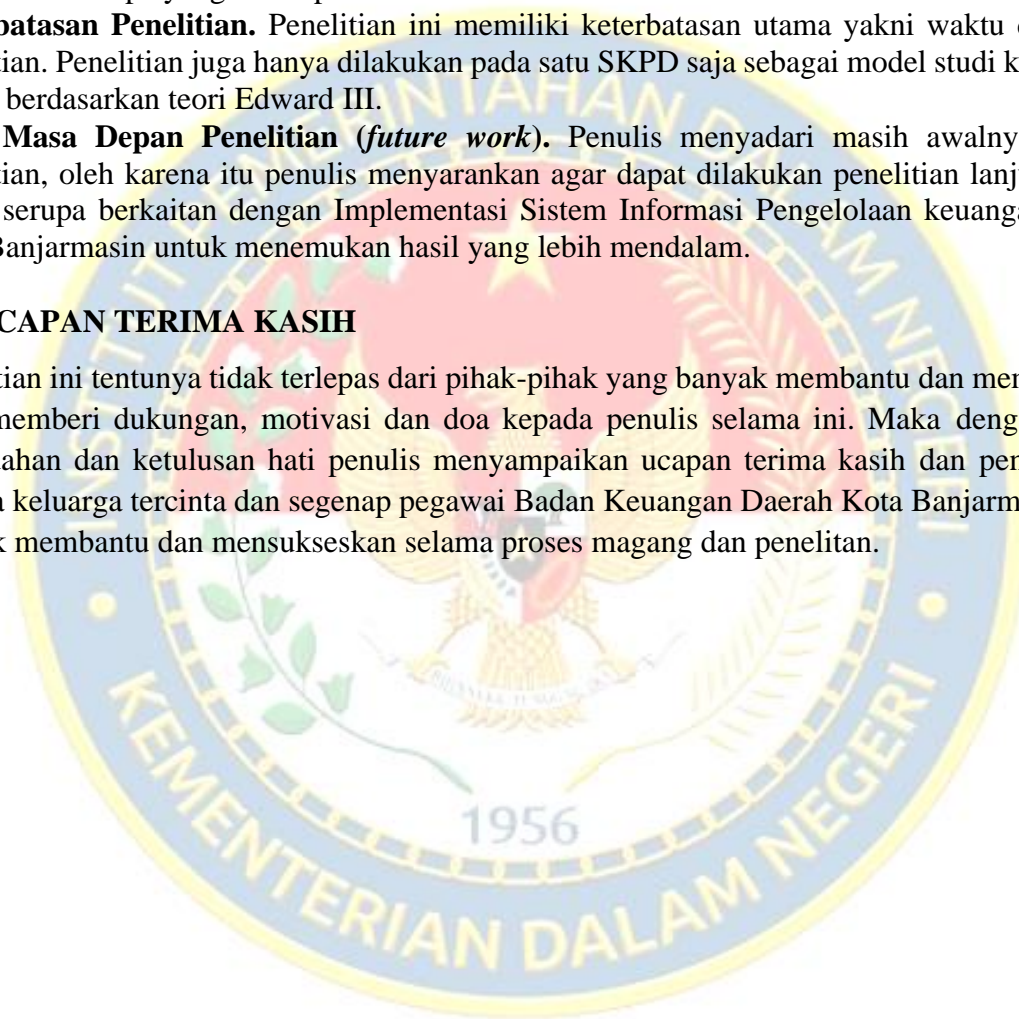
Implementasi SIPKD di lingkungan pemerintah daerah Kota Banjarmasin merupakan sebuah terobosan guna membuat dan memberikan pelaporan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Di tengah pandemi Covid-19 saat ini pun penggunaan SIPKD di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin belum berjalan sesuai dengan Teori Edwards III dengan indikatornya yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hal tersebut di sebabkan bahwa ada faktor-faktor penghambat yang berpengaruh pada Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam mengelola keuangan daerah. Berdasarkan analisis tersebut juga didapatkan bahwa ada upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah dalam menghadapi hambatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah agar pelaksanaan SIPKD bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu SKPD saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Edward III.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan keuangan daerah Kota Banjarmasin untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang banyak membantu dan membimbing serta memberi dukungan, motivasi dan doa kepada penulis selama ini. Maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga tercinta dan segenap pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang banyak membantu dan mensukseskan selama proses magang dan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Latif, Arsan, dkk. 2019 Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Firdausy, Carunia Mulya. 2017. Optimalisasi kebijakan Penerimaan daerah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moenek, Reydonnizar dan Dadang Suwanda, 2019, Good Government pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: Rosda.
- Tambunan, Toman Sony. 2016. Glosarium Istilah Pemerintahan. Jakarta: Prenadamedia Group. Suwanda, Dadang. 2019. Sistem Akuntansi Akrual Pemerintahan Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual. Jakarta: Gramedia.
- Hartono, Bambang. 2013. Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2011 tentang Peningkatan kualitas Akuntabilitas Keuangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Rektor IPDN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
<https://katadata.co.id/timdatajournalism/analisisdata/5ecb63ef78264/asal-usul-virus-corona-masuk-ke-indonesia>, diakses pada Selasa, 10 Agustus 2021 Pkl. 21.15 WIB
<https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>, diakses pada Selasa, 10 Agustus 2021 Pkl 21.30 WIB
<https://kemenkeu.go.id/media/14999/faq-perppu-1-2020.pdf>, diakses pada Jumat, 20 Agustus 2021 Pkl. 10.15 WIB
<https://kalsel.bpk.go.id/daftar-lhp/> diakses pada minggu, 22 Agustus 2021 Pkl.08.00 WIB
<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/13550511/perppu-nomor-1-tahun-2020-untuk-tangani-pandemi-covid-19-resmi-jadi-uu?page=all> diakses pada Senin, 23 Agustus Pkl. 10.15 WIB
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Informasi_Pengelolaan_Keuangan_Daerah diakses pada Selasa 24 Agustus 2021 Pkl.11.00 WIB
<https://sipd.kemendagri.go.id/> , diakses pada Jumat, 20 Agustus 2021 pkl 20.00 WIB